

## Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

**Dian Saputra<sup>1)</sup> Sri Rezeki<sup>2)</sup>**

### INFO ARTIKEL

**Penulis:**

<sup>1)</sup>Universitas Islam Riau,  
Pekanbaru, Indonesia

\*E-mail:

[saputradian@eco.uir.ac.id](mailto:saputradian@eco.uir.ac.id)

<sup>1)</sup>Universitas Islam Riau,  
Pekanbaru, Indonesia

\*E-mail: [sri.rezeki@gmail.com](mailto:sri.rezeki@gmail.com)

**Untuk mengutip artikel ini:**

Saputra, Dian dan Rezeki, Sri. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Jurnal Ekonomi Kiat Vol. 32, No. 2 (2021). Hal 91-97.

**Akses online:**

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

**E-mail:**

[kiat@jurnal.uir.ac.id](mailto:kiat@jurnal.uir.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari riset ini merupakan guna mengenali kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Sukamaju dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak desa sukamaju. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif digunakan penulis untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun data- data agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan teori yang dibahas untuk diambil sebuah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

*This research was conducted in Sukamaju Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the suitability of accounting application in Sukamaju Village with generally accepted accounting principles. Types of data and data sources in this study are primary data. Primary data were obtained by conducting direct interviews with the Sukamaju village. Data collection techniques in this study were carried out by means of interviews and documentation. This research uses descriptive analysis method. The descriptive method is used by the writer to collect, classify and arrange data so that it can be researched based on relevant theories related to the theory discussed to draw a conclusion. The results of this study are the implementation of financial accounting in Sukamaju Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency, not in accordance with the General Accepted Accounting Principle.*

**Kata Kunci:** Akuntansi, Siklus Akuntansi, Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Desa

### 1. Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan di Indonesia yang awalnya menganut paham sentralisasi kini sudah mulai dialihkan, hal ini diketahui sejak ditetapkannya sistem desentralisasi yang berwujud otonomi daerah. Berlandaskan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah berhak untuk mengatur, mengelola serta mengurus sendiri urusan masyarakat maupun urusan pemerintahannya namun harus tetap

sejalan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di indonesia.

Penerapan sistem Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang terdapat dalam UU No 32 tahun 2004 telah diubah menjadi UU N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di harapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat daerah kerana pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang terjadi di daerah tersebut sehingga segala tindakan yang

dilakukan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kondisi daerah serta aspirasi dari masyarakatnya. Otonomi daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat desa karena tidak meratanya pembangunan yang terjadi.

## 2. Tinjauan Teoritis

### a. Pengertian Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan penguatan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat, asal usul dan adat istiadat desa.

Bagi Sujarweni (2015) Akuntansi Pemerintahan berkaitan dengan bidang keuangan, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk implikasi yang ditimbulkannya. Dalam kasus Sadeli (2015), akuntansi pemerintah mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Tujuan akuntansi publik adalah untuk menyediakan laporan akuntansi yang membantu mengelola aspek administrasi pemerintahan dan membantu manajemen dalam mengelola pengeluaran berdasarkan anggaran sesuai dengan persyaratan undang-undang yang berlaku.

Dari pengertian tersebut dapat diduga bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang dapat digunakan oleh organisasi atau lembaga pemerintah non-komersial dan digunakan sehubungan dengan keputusan ekonomi yang dibuat oleh pihak-pihak yang membela kepentingan masyarakat.

### b. Pengertian Pemerintah desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa pasal 18

wewenang desa mencakup pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, penerapan pembangunan desa, pelatihan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan rakyat desa berlandaskan prakarsa rakyat, hak berdari usul, dan istinorma istinorma desa.

Peranan akuntansi pemerintahan adalah sediakan laporan akuntansi yg bermanfaat terkait aspek kepengurusan administrasi pemerintah, & menolong manajemen pada melakukan supervisi atas pengeluaran lewat anggaran, cocok menggunakan kondisi undang-undang yg berlaku.

Dari penafsiran tadi sanggup disimpulkan jika akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yg sanggup dipakai pada sesuatu organisasi pemerintahan ataupun forum yg nir bertujuan guna mencari laba dan dipakai pada rangka pengambilan keputusan ekonomi sang pihak-pihak yg membutuhkan pada mengendalikan dan mengurus kepentingan rakyat setempat.

### c. Penggunaan Akuntansi Pemerintahan Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan selalu menggunakan informasi akuntansi adalah: (IAIKASP, 2015).

- 1) Pihak Internal. Pihak dalam adalah pihak dalam struktur organisasi kota: walikota, walikota, bendahara dan kepala departemen/kepala departemen.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Orang yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kota (APBDesa).
- 3) Pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah, serta pemerintah daerah dan daerah, mengingat bahwa APBD datang dalam bentuk transfer, bagi hasil, dan dukungan keuangan dari APBN dan APBD.
- 4) Peserta lainnya. Selain pihak-pihak di atas, masih banyak pihak lain yang bisa mengecek laporan keuangan desa.

Kelompok Swadaya Desa, RT/RW, dan lain-lainnya.

#### d. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

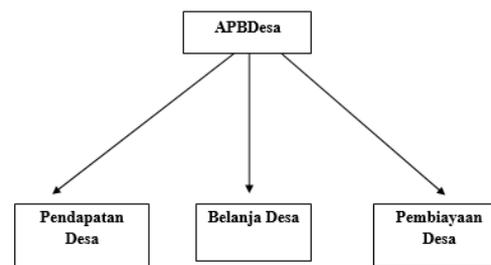
Dasar pencatatannya adalah untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat. Menurut Harim dan Muhammad (2012), mereka menyatakan:

- 1) Cash-based Cash-based adalah bentuk akuntansi yang paling sederhana. Berdasarkan hal tersebut, transaksi dicatat apabila transaksi tersebut menyebabkan perubahan atau perubahan arus kas. Jika transaksi ekonomi tidak mempengaruhi uang, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.
- 2) Akuntansi akrual Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi untuk mengakui transaksi dan peristiwa lain yang terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan).
- 3) Modified Bar Base Basis ini mencatat transaksi selama tahun fiskal dan diselesaikan dengan basis akrual pada akhir tahun fiskal.
- 4) Prinsip Akrual yang dimodifikasi
- 5) Akuntansi Akrual yang dimodifikasi menargetkan transaksi berdasarkan pembayaran tunai untuk transaksi tertentu dan mencakup dari sebagian besar transaksi berdasarkan akuntansi akrual. Pembatasan penggunaan berbasis reservasi didasarkan pada pertimbangan praktis.

#### e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan adanya rancangan dan penetapan anggaran desa diharapkan pemerintah desa dapat berfungsi dengan baik, dan anggaran yang dikeluarkan selama proses pengelolaan pemerintahan diatur oleh anggaran desa. Menurut Faradhiba & Diana (2018), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditujukan untuk memberikan informasi

kepada masyarakat dan pemerintah tentang kegiatan desa dalam mengelola dana desa, bagi pemilik instansi pemerintah desa. bentuk pertanggungjawaban. Pelaksanaan rencana program yang dibiayai oleh desa. APBdesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa:



Sumber : diolah dari Permendagri No 113 Tahun 2014

Gambar 1. Poin ABBdesa

### 3. Metode Penelitian

#### Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah Metode penelitaian kualitatif deskriptif. Dalam Penelitin kualitatif terdapat konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi yang dapat dikembangkan berdasarkan “kejadian” yang ada selama menjalani kegiatan lapangan, oleh karena itu kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan, keduanya berlangsung secara simultan prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linear Rijali (2019).

Sedangkan menurut (ZAI, 2019) metode dekriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dari objek penelitian yang nantinya akan diklasifikasikan sehingga memberikan suatu kesimpulan dari kejadian atau fakta-fakta.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini sudah tepat karena penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai hubungan antara sistem akuntansi terhadap objek penelitiannya.

### Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya berada di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dapat diperoleh dari Kantor Desa Sukumaju sebagai data masalah yang sedang diselidiki, seperti data keuangan. Data tersebut diperoleh dari Sekretaris dan Bendahara Desa Suka Maju. Contoh, Laporan kekayaan desa, laporan pelaksanaan anggaran desa, dana umum negara, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu kegiatan, sejarah desa dan susunan organisasi.

### Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan penulis adalah metode pendekatan deskriptif. Metode deskriptif digunakan penulis untuk mengumpulkan, mengelompokan dan menyusun data-data agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan teori yang dibahas untuk diambil sebuah kesimpulan.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Semua transaksi pengeluaran dan penerimaan Desa Suka Maju dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan sistem pencatatan tunggal. Sistem pembukuan single entry berjalan pada sistem pembukuan tunggal atau bookkeeping. Metode single entry adalah kegiatan yang mencatat semua transaksi yang mempengaruhi rekening kas yang tercatat di kolom pengeluaran dalam Buku kas umum (BKU).

Dasar pengakuan atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di Buku Kas Umum (BKU) di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan menggunakan cash basic. cash basic adalah pengakuan suatu transaksi apabila kas sudah diterima atau dikeluarkan.

### a) Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan adalah tahapan awal dalam siklus akuntansi yang dilakukan pada Desa Sukamaju, tahap pencatatan dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi kedalam buku yang sesuai yang terdiri dari buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu kegiatan

### b) Buku Kas Umum

Desa Sukamaju melakukan pencatatan ke dalam Buku Kas Umum terhadap semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Berikut pencatatan Buku Kas Umum yang dilakukan di Pemerintahan Desa Sukamaju.

### c) Buku Bank

Desa Sukamaju melakukan pencatatan atas setiap uang masuk (penerimaan) maupun uang yang keluar (pengeluaran) yang dilakukan baik secara transfer maupun tunai melalui bank, pencatatan tersebut dilakukan dalam buku bank desa. Berikut pencatatan Buku Bank Desa yang dilakuan oleh Pemerintah Desa Sukamaju.

### d) Buku Kas Pembantu pajak

Desa Sukamaju melakuan pencatatan atas setiap penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Berikut pencatatan Buku Kas Pembantu Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukamaju.

#### e) Buku Kas Pembantu Pajak

Desa Sukamaju melakukan pencatatan secara rinci dan detail atas setiap kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana desa kedalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Berikut pencatatan Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukamaju.

#### f) Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Sukamaju melakukan pencatatan secara rinci dan detail atas setiap kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana desa kedalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Berikut pencatatan Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukamaju.

#### g) Tahap Penggolongan

Tahap penggolongan merupakan tahapan selanjutnya yang seharusnya dilakukan dalam siklus akuntansi di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### h) Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran merupakan tahapan selanjutnya yang seharusnya dilakukan dalam siklus akuntansi di Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah melakukan penggolongan setiap transaksi kedalam buku besar selanjutnya dilakukan pengikhtisaran kedalam neraca saldo dan neraca lajur.

#### i) Neraca Saldo

Desa Sukamaju belum membuat neraca saldo yang sesuai dengan pedoman yang ada dalam IAI-KSAP 2015 dan prinsip akuntansi berterima umum.

#### j) Neraca Lajur

Setelah membuat neraca saldo dan penyesuaian, Kabupaten Kuantan Singingi dapat membuat neraca lajur. Neraca lajur dibuat untuk mempermudah dalam membuat atau menyajikan Laporan Keuangan. Berikut Neraca Lajur yang dapat

dibuat oleh Desa Sukamaju menurut IAI-KSAP.

#### Laporan Kekayaan Milik Desa

Aset tetap yang ada di Laporan Kekayaan Milik Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan jaringan dan instalasi, dan aset tetap lainnya. Namun penyajiannya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Sukamaju tidak melakukan penyusutan aset tetap, sehingga nilai perolehan aset tetap tersebut disajikan tanpa dikurangkan dengan akumulasi penyusutan.

Seharusnya penyusutan dilakukan terhadap akun Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan jaringan dan instalasi, dan aset tetap lainnya yang ada dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa menunjukkan nilai yang sebenarnya dan berpedoman pada IAI KSAP-2015 serta PABU.

Pemerintah Desa Sukamaju hanya mencatat nilai dari aset tetap pada tahun yang sedang berlangsung saja sehingga tidak terjadi keberlanjutan nilai dari aset tetap setiap tahunnya. Oleh sebab itu maka perlu diketahui nilai penyusutan aset tetap yang dilakukan disetiap tahunnya untuk dapat mengetahui akumulasi penyusutan di tahun 2019.

Untuk akun peralatan dan mesin seharusnya dilakukan penyusutan per barang yang dibeli pertahun nya, namun dikarenakan tidak adanya data daftar barang tersebut secara terperinci maka peneliti akan menyusutkan total nilai dari akun peralatan dan mesin tersebut.

Penerapan SISKEUDES baru dilakukan sejak tahun 2018 di Desa Sukamaju yang menyebabkan nilai aset tetap yang ada di 2018 merupakan penggabungan dari nilai aset tetap dari awal pembentukan desa hingga tahun 2018, selanjutnya untuk tahun 2019 barulah nilai aset tetap desa dicatat sesuai dengan tahun

perolehannya. oleh karena itu perlu diketahui tahun perolehan asli setiap akun aset tetap tersebut untuk dapat menghitung akumulasi penyusutannya dengan benar.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang berisi realisasi dari pendapatan, pembiayaan dan belanja untuk tahun anggaran yang telah ditentukan pemerintah desa yang bersangkutan.

## 5. Simpulan dan Saran

- a. Desa Sukamaju menerapkan dasar pengakuan cash basic. cash basic merupakan pengakuan/pencatatan suatu transaksi apabila mempengaruhi kas. baik itu penerimaan maupun pengeluaran akan diakui/dicatat saat kas sudah diterima atau dikeluarkan.
- b. Desa Sukamaju menerapkan sistem pencatatan single entry. Single entry merupakan kegiatan pencatatan setiap transaksi yang akan mempengaruhi akun kas, transaksi yang mengakibatkan saldo kas desa bertambah maka akan dicatat dalam kolom penerimaan, sedangkan transaksi yang mengakibatkan saldo kas desa berkurang akan dicatat dalam kolom pengeluaran.
- c. Desa Sukamaju dalam membuat laporan keuangannya menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES).
- d. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Ganting jumlah aset yang diperoleh tahun 2018 tidak dilaporkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019.
- e. 5.15 Desa Sukamaju tidak melakukan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang menyebabkan nilai dari aset tetap tidak disajikan secara wajar dan tidak dapat diandalkan keakuratannya.
- f. 5.1.6 Penerapan akuntansi pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

## Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan diatas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Desa Sukamaju menerapkan sistem pencatatan double entry.
- b. Yang mana setiap pencatatan yang dilakukan terjaga persamaan dasar akuntansinya karena dicatat disisi debit dan kredit.
- c. Sebaiknya Desa Sukamaju menerapkan Basis Akrua (*accrual basic*).
- d. Yang mana setiap transaksi akan dicatat serta diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.
- e. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Ganting jumlah aset yang diperoleh tahun 2018 harusnya dilaporkan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019.
- f. Sebaiknya Pemerintah Desa Sukamaju melakukan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap agar nilai dari aset tetap dapat disajikan secara wajar dan dapat diandalkan keakuratannya.
- g. Sebaiknya penerapan akuntansi di Desa Sukamaju dalam Mengelola keuangan desa berpedoman pada IAI-KSAP 2015.
- h. Sebaiknya siklus akuntansi di Desa Sukamaju dimulai dari tahap pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan.
- i. Sebaiknya Kabupaten Kuantan Singingi dalam membuat laporan keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

## Daftar Pustaka

- Arief, K. (2018). Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa. Vol.10 NO., 34–43.
- E.P Mentu., J. J. S., & . (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal Emba, 4(71), 1392–1399.
- Erlina, Rambe Omar Sakti, R. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Salemba Empat.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). E-Jra Vol. 07 No. 01 Agustus 2018, 07(01), 32–45.
- Halim. Abdul, S. M. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
- Hasanah. Nuramalia, F. A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. In Media.
- Lubis, A. I. (2017). Akuntansi Keperilakuan Akuntansi Multiparadigma. Salemba Empat.
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2), 196–212. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.237>.
- Sitorus, Selvina., L Kalangi., S. . W. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Pp.No 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. The Journal Of The Japan Society For Respiratory Endoscopy, 37(3), 343. [https://doi.org/10.18907/jrsre.37.3\\_343\\_4](https://doi.org/10.18907/jrsre.37.3_343_4).
- Sudarman, L., & Kartomo. (2019). Dasar-Dasar Akuntansi. Deepublish.
- Warren.Carls S, Reevee. James M, Duchac. Jonathan E., Wahyuni. Ersa Tri, J. A. A. (2017). Pengantar Akuntansi. Salemba Empat.
- Zai, K. S. T. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas. 22–34.
- Iai-Ksap. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Ikatan Akuntansi Indonesia, 1–75.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).